

**PENGARUH PAJAK, RETRIBUSI DAN PENDAPATAN LAIN-
LAIN YANG SAH TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
DI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN**

Oleh :

Nyoman Ariana Guna, SE M. Agb
Email : arianaguna1@gmail.com, I com
Drs I Dewa Gede Rastana. M. Agb
Email : dewarastana59@gmail.com
Dr I Wayan Mula Sarjana, SE, M. Si
Email : mulasarjana46@gmail.com

ABSTRACT

**THE EFFECT OF TAXES, LEGITIMES AND OTHER LEGITIMATE INCOME
ON REGIONAL INCOME IN THE GOVERNMENT OF
TABANAN REGENCY**

Many factors can affect regional income in the Tabanan Regency Government, one of which is taxes, levies and other legitimate income, so in this study it will be examined about the effect of taxes, levies and other legitimate income on regional income in the Tabanan Regency Government. .

Based on data analysis, the results obtained (1) tax has a positive and significant effect partially on regional income in the Tabanan Regency Government, because the t-count value is greater than the t-table value ($5.827 > 1.943$) and the significance value is less than five percent ($0.000 < 0.050$), (2) retribution has a positive and significant effect partially on regional income in the Tabanan Regency Government, because the t-count value is greater than the t-table value ($2.971 > 1.943$) and the significance value is less than five percent ($0.000 < 0.050$), (3) Other legitimate income has a positive and significant partial effect on regional income in the Tabanan Regency Government, because the t-count value is greater than the t-table value ($3.846 > 1.943$) and the significance value is less than five percent ($0.042 < 0.050$) and (4) taxes, levies and other legitimate income have a significant simultaneous effect on regional income in the Tabanan Regency Government, because the calculated F value is greater than the table F value ($34.009 > 4.760$).

To the Tabanan Regency government given the importance of regional income in carrying out regional development, it is hoped that the Tabanan Regency government should be able to optimize the potential of the region it has so that revenue from taxes, levies and other legitimate income can continue to increase in the future

Keywords: *Legitimate Income, Taxes, Levies and Other Income*

1. Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi memiliki arti luas yaitu suatu proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional maupun lokal dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja yang

tinggi akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat (Arsyad, 2010).

Adanya otonomi daerah, setiap daerah-daerah otonom dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta membangun daerahnya. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab

Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pendapatan daerah sebagai sumber pendapatan dalam membiayai pembangunan perlu dikelola dengan baik. Dalam hal ini dibutuhkan berbagai kebijakan yang lebih komprehensif, efektif dan efisien dalam mengelolanya. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali.

Kebijakan ekonomi yang dilancarkan Pemerintah Kabupaten Tabanan dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan per kapita sampai pada pemerataan hasil pembangunan untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diharapkan. Berikut ini disajikan data pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan selama lima tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Data Pendapatan Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan

No.	Tahun	Pendapatan Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan	
		(Ribu Rupiah)	Pertumbuhan (%)
1	2016	300,799,020,964.83	-
2	2017	318,083,799,105.63	5,75
3	2018	426,635,750,740.34	34,13
4	2019	363,370,469,708.67	-14,83
5	2020	354,558,239,084.47	-2,43

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan (2021)

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 Pendapatan Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2019 dan 2020 Pendapatan Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalami penurunan. Dalam hal ini Pendapatan Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalami fluktuasi berarti pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tabanan kurang bagus dalam memaksimalkan potensi wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Tabanan sehingga menyebabkan terjadinya penurunan Pendapatan Daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan pada tahun 2019-2020.

2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan?
2. Apakah retribusi berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan?
3. Apakah pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan?
4. Apakah pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan?

3. Metode dan lokasi Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur yang tersusun sistematis untuk mencari, menentukan dan mendapatkan data yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan yang terletak di Jalan Pahlawan No. 19 Tabanan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan, keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh Bupati. Objek penelitian ini adalah pajak, retribusi, pendapatan lain-lain yang sah dan pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

4. Hasil dan Pembahasan

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, ditambah dengan koefisien determinasi berganda dan pembuktian hipotesis menggunakan uji statistik yaitu uji t dan uji F. Pengolahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan bantuan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Rangkuman hasil olah data atau hasil perhitungan dengan program SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Rangkuman Hasil Perhitungan Analisis SPSS

Model	B	t hitung	Sig. t	Tolerance	VIF
(Constant)	170091363,843	1,027	0,763	-	-
Pajak (X_1)	2,763	5,827	0,000	0,757	1,321
Retribusi (X_2)	0,518	2,971	0,025	0,878	1,139
Pendapatan lain-lain yang sah (X_3)	0,192	3,846	0,017	0,795	1,258
R Square (R^2)	F hitung	Sig. F	Durbin-Watson		
0,944	34,009	0,000	1,703		

Sumber: Hasil Olah Data Kampus Untab (2021)

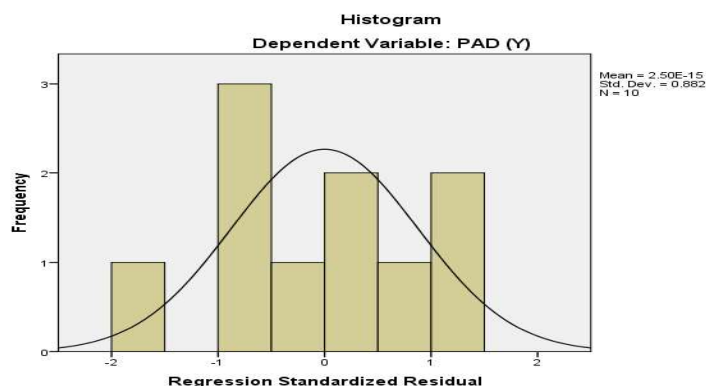
Berdasarkan Tabel 2 maka dapat diketahui semua parameter yang digunakan untuk menganalisis dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Analisis data yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Uji asumsi klasik

Mengetahui bahwa persamaan regresi linear berganda yang didapat memiliki ketepatan dalam estimasi dalam mencari peramalan maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yaitu dengan uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi.

a. Uji normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk mengetahui apakah model regresi yang didapat memiliki residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik jika residual model regresi yang didapat berdistribusi normal. Mengetahui apakah persamaan regresi yang didapat berdistribusi normal atau tidak akan dilakukan dengan melihat grafik histogram hasil persebaran data dengan program SPSS, berikut disajikan gambar grafik histogram dari hasil analisis data.



Gambar 1 Histogram Uji Normalitas Frequency

Berdasarkan gambar grafik histogram di atas dapat dilihat terdapat garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang sejajar dan simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model regresi ini berdistribusi normal.

b. Uji multikolinearitas

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan variabel terikat, dalam penelitian ini menggunakan nilai *tolerance* dan nilai VIF. Berdasarkan hasil analisis data maka dapat diketahui nilai *tolerance* dan nilai VIF dari hasil analisis SPSS, arti dari angka-angka ini adalah:

- 1) Nilai *tolerance* dan VIF dari pajak (X_1) adalah 0,757 dan 1,321 ini berarti variabel pajak (X_1) tidak mengalami gejala multikolinearitas, karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($0,757 > 0,10$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($1,321 < 10$).
- 2) Nilai *tolerance* dan VIF dari retribusi (X_2) adalah 0,878 dan 1,139 ini berarti variabel retribusi (X_2) tidak mengalami gejala multikolinearitas, karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($0,878 > 0,10$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($1,139 < 10$).
- 3) Nilai *tolerance* dan VIF dari pendapatan lain-lain yang sah (X_3) adalah 0,795 dan 1,258 ini berarti variabel pendapatan lain-lain yang sah (X_3) tidak mengalami gejala multikolinearitas, karena nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 ($0,795$

$> 0,10$) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 ($1,258 < 10$).

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear berganda yang didapat baik untuk dijadikan peramalan atau baik untuk mengestimasi. Ukuran dalam menentukan ada tidaknya gejala autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW). Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diketahui nilai *Durbin-Watson* (DW) adalah 1,703, ini berarti bahwa dalam model regresi linear berganda ini tidak terjadi gejala autokorelasi sehingga model regresi linear berganda ini sangat baik untuk dijadikan estimasi dikarenakan nilai *Durbin-Watson* (DW) berada direntang -2 dan 2 ($1,703 > DW -2$ dan $1,703 < DW 2$).

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Berikut disajikan gambar grafik *scatterplot* dari data yang digunakan dalam model ini.

Pada *scatterplot* di atas dapat dilihat bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dan tidak memiliki pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linear berganda yang didapat tidak ada gejala heteroskedastisitas.

2. Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk mengetahui hubungan kasual atau pengaruh antara

pajak (X_1), retribusi (X_2) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y) dengan asumsi faktor pengganggu dianggap tidak ada. Berdasarkan Tabel 4.8 maka dapat dibuat satu model persamaan regresi linear berganda, yaitu sebagai berikut:

$$Y = 170091363,843 + 2,763 X_1 + 0,518 X_2 + 0,192 X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda di atas, maka dapat diketahui arah pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang ditunjukkan oleh koefisien regresinya. Interpretasi dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Nilai b_0 (konstanta/*intercept*) sebesar 170091363,843 memiliki arti bahwa, apabila diasumsikan bahwa pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah bernilai nol atau konstan, maka pendapatan daerah di pemerintah Kabupaten Tabanan rata-rata sebesar 170.091.363,843 ribu rupiah.

b. Nilai b_1 (koefisien regresi X_1) sebesar 2,763 memiliki arti bahwa, bila pajak (X_1) naik sebanyak satu ribu rupiah, maka pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan akan naik rata-rata sebesar 2,763 ribu rupiah dengan asumsi bahwa retribusi (X_2) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) konstan atau tetap.

c. Nilai b_2 (koefisien regresi X_2) sebesar 0,518 memiliki arti bahwa, bila retribusi (X_2) naik sebanyak satu ribu rupiah, maka pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan akan naik rata-rata sebesar 0,518 ribu

rupiah dengan asumsi bahwa pajak (X_1) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) konstan atau tetap.

d. Nilai b_3 (koefisien regresi X_3) sebesar 0,192 memiliki arti bahwa, bila pendapatan lain-lain yang sah (X_3) naik sebanyak satu ribu rupiah, maka pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan akan naik rata-rata sebesar 0,192 ribu rupiah dengan asumsi bahwa pajak (X_1) dan retribusi (X_2) konstan atau tetap.

3. Koefisien determinasi berganda (R^2)

Koefisien determinasi berganda (*R Square*) yang disimbolkan dengan R^2 yang merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y) mampu dijelaskan oleh pajak (X_1), retribusi (X_2) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) secara bersama-sama, sehingga dapat diketahui seberapa besar X_1 , X_2 dan X_3 mempengaruhi Y . Berdasarkan Tabel 2, maka dapat diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,944 ini berarti bahwa 94,4 persen variasi (naik turunnya) pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan mampu dijelaskan oleh variasi (naik turunnya) pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah, sedangkan sisanya 5,6 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

4. Uji hipotesis secara parsial (Uji t)
Uji hipotesis secara parsial (Uji t) digunakan untuk menguji apakah variabel pajak (X_1), retribusi (X_2) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) mempunyai pengaruh nyata atau tidak

terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y) secara individu atau sendiri.

a. Uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk pajak (X_1)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai t hitung b_1 sebesar 5,827 dan signifikasinya adalah sebesar 0,000. Nilai t tabel dari b_1 dengan uji satu sisi sebelah kanan, dapat dicari dengan formulasi: $t \text{ tabel} = t [\alpha ; (n-k)]$, di mana $\alpha = 5 \text{ persen} = 0,05$, dengan derajat kebebasan $= n-k = 10-4 = 6$, sehingga $t \text{ tabel} = t (0,05;6) = 1,943$. Angka-angka ini memberikan arti bahwa pajak (X_1) mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y), karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($5,827 > 1,943$) dan signifikansi lebih kecil dari pada lima persen yaitu 0,000 ($0,000 < 0,050$), sehingga dapat dibuat gambar daerah penolakan dan penerimaan H_0 .

Berdasarkan pengujian parameter dan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh positif dan nyata dari pajak secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

b. Uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk retribusi (X_2)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai t hitung b_2 sebesar 2,971 dan signifikasinya adalah sebesar 0,025. Nilai t tabel dari b_2 dengan uji satu sisi sebelah kanan, dapat dicari dengan formulasi: $t \text{ tabel} = t [\alpha ; (n-k)]$, di mana $\alpha = 5 \text{ persen} = 0,05$, dengan derajat kebebasan $= n-k = 10-4 = 6$, sehingga $t \text{ tabel} = t (0,05;6) =$

1,943. Angka-angka ini memberikan arti bahwa retribusi (X_2) mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y), karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,971 > 1,943$) dan signifikansi lebih kecil dari pada lima persen yaitu 0,025 ($0,025 < 0,050$), sehingga dapat dibuat gambar daerah penolakan dan penerimaan H_0 .

Berdasarkan pengujian parameter dan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh positif dan nyata dari retribusi secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

c. Uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk pendapatan lain-lain yang sah (X_3)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai t hitung b_3 sebesar 3,846 dan signifikasinya adalah sebesar 0,017. Nilai t tabel dari b_3 dengan uji satu sisi sebelah kanan, dapat dicari dengan formulasi: $t \text{ tabel} = t [\alpha ; (n-k)]$, di mana $\alpha = 5 \text{ persen} = 0,05$, dengan derajat kebebasan $= n-k = 10-4 = 6$, sehingga $t \text{ tabel} = t (0,05;6) = 1,943$. Angka-angka ini memberikan arti bahwa pendapatan lain-lain yang sah (X_3) mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y), karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,846 > 1,943$) dan signifikansi lebih kecil dari pada lima persen yaitu 0,017 ($0,017 < 0,050$), sehingga dapat dibuat gambar daerah penolakan dan penerimaan H_0 . Berdasarkan pengujian parameter dan gambar di

atas maka dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh positif dan nyata dari pendapatan lain-lain yang sah secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

5. Uji hipotesis secara simultan (Uji F)

Uji hipotesis secara simultan (Uji F) digunakan untuk menguji apakah variabel pajak (X_1), retribusi (X_2) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) mempunyai pengaruh yang nyata terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y) secara bersama-sama atau serempak. Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 34,009 dan signifikasinya adalah sebesar 0,000. Nilai F tabel dapat dicari dengan formulasi: $F \text{ tabel} = F [\alpha ; df_1 (k-1) ; df_2 (n-k)]$, di mana $\alpha = 5$ persen = 0,05, dengan derajat kebebasan satu (df_1) = $k-1 = 4-1 = 3$ dan derajat kebebasan dua (df_2) = $n-k = 10-4 = 6$, sehingga $F \text{ tabel} = F_{0,05 (3;6)} = 4,760$. Angka-angka ini memberikan arti bahwa pajak (X_1), retribusi (X_2) dan pendapatan lain-lain yang sah (X_3) mempunyai pengaruh nyata secara simultan terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan (Y), karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($34,009 > 4,760$) dan signifikansi lebih kecil dari pada lima persen yaitu 0,000 ($0,000 < 0,050$), sehingga dapat dibuat gambar, daerah penolakan dan penerimaan H_0 seperti berikut:

Berdasarkan pengujian parameter dan gambar di atas, maka dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh nyata dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang

sah secara simultan terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pajak berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($5,827 > 1,943$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari lima persen ($0,000 < 0,050$).

2. Retribusi berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,971 > 1,943$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari lima persen ($0,000 < 0,050$).

3. Pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, dikarenakan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($3,846 > 1,943$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari lima persen ($0,042 < 0,050$).

4. Pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah berpengaruh nyata secara simultan terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, dikarenakan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel ($34,009 > 4,760$) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari lima persen ($0,000 < 0,050$).

6. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sehubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Mengingat pajak mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka di sarankan kepada pemerintah Kabupaten Tabanan harus berupaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan jalan melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak sehingga para wajib pajak tidak lupa dan selalu ingat agar taat dalam membayar kewajibannya.

2. Mengingat retribusi mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka di sarankan kepada pemerintah Kabupaten Tabanan dapat meningkatkan penerimaan retribusi daerah dengan jalan melakukan membangun dan meningkatkan sarana dan fasilitas pendukung bagi masyarakat serta memperketat pengawasan para petugas pemungut.

3. Karena pendapatan lain-lain yang sah mempunyai pengaruh positif dan nyata secara parsial terhadap pendapatan daerah di Pemerintah Kabupaten Tabanan, maka diharapkan pemerintah dapat membuat suatu kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan lain-lain yang sah seperti memperbanyak transaksi jasa giro.

4. Kepada pemerintah Kabupaten Tabanan mengingat pentingnya pendapatan daerah dalam melakukan pembangunan daerah, maka

diharapkan pemerintah Kabupaten Tabanan harus dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki agar penerimaan dari pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah dapat terus meningkat ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad. 2010. *Pembangunan Ekonomi Publik*. Jakarta: Grasindo.

Antara, Ady. 2019. *Statistik Penelitian*. Denpasar: Keraras Emas.

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tabanan 2021.

Baiquni, M. 2009. *Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran-Otonomi di Wilayah Kepulauan*. Yogyakarta: Ilmu Pustaka.

Barro, Robert J. 2015. *Inequality, Growth and Investment, National Bureau Of Economic Research*, Working Paper No. 73038, JEL No. 0413. Availabel : <http://www.nbr.org/paper/w708>.

Eka Putriani. 2011. *Pengaruh Retribusi Parkir dan Retribusi Perizinan Terhadap PAD di Kabupaten Bulukumba*. Bulukumbang: Universitas Islam Negeri Alauddin.

Gujarati. 2008. *Basic Econometric, (Fourth edition), USA, Mc Graw-Hill Internatonal (Terjemahan)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Iluda Suanto. 2013. *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di Kabupaten Semarang*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kuznets. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Surabaya: PT Grafindo Media Pustaka.
- Marwan, A. 2013. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta. Bina Nusantara.
- Muhammad Maulana. 2009. Pengaruh Retribusi daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone. Bone: Universitas Hasanuddin.
- Soekirno, Sadono. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soemitro. 2010. *Perpajakan II*. Jakarta: Bina Cipta.
- Suparmoko, 2009, *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Alfa Media.
- Supratman, Mawa. 2020. Leadership 101: hal-hal yang harus di ketahui oleh pemimpin. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suwatno. 2011. Penilaian Kinerja Organisasi dan Pegawai. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tarigan, Robinson. 2014. *Basis Ekonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah